

**Diadopsi pada Pertemuan AMAF ke-40
11 Oktober 2018 Ha Noi, Vietnam**

PENDEKATAN AMAF TERHADAP PENGARUSUTAMAAN GENDER DI SEKTOR PANGAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN

**KELOMPOK KERJA TEKNIS ASEAN UNTUK PENGEMBANGAN
PERTANIAN DAN PENELITIAN (ATWGARD)**

TAHUN 2018

Translated from the AMAF's Approach to Gender

Mainstreaming in the Food, Agriculture and Forestry Sectors

Disclaimer: This is an unofficial translation and provided for reference only.

AMAF's Approach to Gender Mainstreaming in the Food, Agriculture and Forestry Sectors, 2018.

To find the original version of the guideline please visit the ASEAN Secretariat website, <https://asean.org/> or download at <https://asean-crn.org/relevant-asean-guidelines-on-land-use/>.

The translation has been produced with the support of the Climate Smart Land Use in ASEAN (CSLU) project, funded by the German Ministry for Economic Cooperation and Development and implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).



implemented by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

In cooperation with



Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didirikan pada 8 Agustus 1967. Negara-negara anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sekretariat ASEAN berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

Untuk informasi lebih jauh, hubungi:

Sekretariat ASEAN

Divisi Hubungan Masyarakat 70A Jalan Sisingamangaraja Jakarta 12110

Indonesia

Telepon: (62 21) 724-3372, 726-2991 Faks : (6221) -8234 724-3504 E-mail:

Public.div@asean.org

Informasi umum tentang ASEAN tersedia secara daring di Situs ASEAN: www.asean.org
Catalogue-in-Publication Data

Pendekatan AMAF untuk pengarusutamaan gender di sektor pangan, pertanian dan kehutanan Jakarta: Sekretariat ASEAN, 2018.

DAFTAR ISTILAH

ACW	Komite Perempuan ASEAN
AMAF	Pertemuan Para Menteri ASEAN tentang Pertanian dan Kehutanan
AMS	Negara-negara Anggota
ASCC	Komunitas Sosial Budaya ASEAN
ASEAN.	Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
ASOF	Pejabat Senior ASEAN di bidang Kehutanan
ASWGL	Kelompok Kerja Sektor ASEAN untuk Peternakan
ASWGC	Kelompok Kerja Sektor ASEAN untuk Tanaman
ASWGFi	Kelompok Kerja Sektor ASEAN untuk Perikanan
ATWGARD	Penelitian dan Pengembangan Pertanian
AWGCC	Kelompok Kerja ASEAN untuk Perubahan Iklim
COP	Konferensi Para Pihak
CSA	Pertanian Cerdas Iklim
FAO	Organisasi Pangan dan Pertanian PBB
FES	Friedrich- Ebert-Stiftung
FCPF	<i>Forest Carbon Partnership Facility</i>
GSVC	Rantai Nilai Sensitif Gender
HPA	Rencana Aksi Hanoi
ID	Institut Studi Pembangunan
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
PP	Proposal Persiapan Kesiapan
SPA	Rencana Aksi Strategis
SSF	Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNFCCC	Konvensi Kerangka Kerjasama Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim
UNDRIP	Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

VAP	Program Aksi Vientiane
WTO	Organisasi Perdagangan Dunia

KATA PENGANTAR

Pendekatan AMAF untuk pengarusutamaan gender di sektor pangan, pertanian dan kehutanan diselesaikan oleh Kelompok Kerja Teknis ASEAN untuk Penelitian dan Pengembangan Pertanian (ATWGARD) dengan dukungan dari Kelompok Kerja ASEAN untuk Peternakan, Tanaman dan Perikanan dan Pejabat Senior ASEAN untuk Kehutanan (ASOF) dan Komite ASEAN untuk Perempuan (ACW).

Pendekatan AMAF untuk pengarusutamaan gender di sektor pangan, pertanian dan kehutanan didefinisikan sebagai langkah-langkah publik yang menerapkan perspektif gender sehingga memengaruhi perilaku kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang berbeda (seperti produsen, petani dan regulator). Kebijakan gender mencakup elemen-elemen kunci untuk diintegrasikan ke dalam serangkaian kebijakan dan program untuk memastikan perempuan yang bekerja di sektor pangan, pertanian dan kehutanan di ASEAN diberdayakan.

Beranjak dari pengakuan bahwa ketidaksetaraan gender juga dijumpai pada sektor pangan, pertanian dan kehutanan, dan bahwa kebijakan dan kerangka kerja publik menghasilkan dampak gender yang signifikan pada ketiga sektor tersebut; Pendekatan AMAF bertujuan menetapkan rekomendasi yang menjadi panduan referensi bagi AMS dalam upayanya mendorong kesetaraan gender di sektor pangan, pertanian dan kehutanan. Pendekatan AMAF tidak dimaksudkan sebagai pernyataan penuh atau mengikat tentang gender. Pendekatan AMAF akan membantu meningkatkan kesadaran AMS akan pentingnya kebijakan gender di sektor pangan, pertanian dan kehutanan, dengan tujuan memicu pengembangan praktik terbaik dan meningkatkan kerja sama antara Negara Anggota ASEAN.

Pendekatan AMAF untuk pengarusutamaan gender di sektor pangan, pertanian dan kehutanan, yang merupakan dokumen publik, akan menjadi referensi yang dinamis karena akan diperbarui secara berkala oleh ATWGARD untuk mencerminkan setiap perubahan dan perkembangan di ASEAN serta praktik terbaik pada tingkat internasional/regional.

Pendekatan AMAF untuk pengarusutamaan gender di sektor pangan, pertanian dan kehutanan diadopsi oleh Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF) pada Pertemuan AMAF ke-40 tahun 2018 di Ha Noi, Vietnam.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH.....	4
KATA PENGANTAR.....	6
1. PENGANTAR	9
1.1 Kesetaraan Gender di ASEAN.....	9
1.2 Perempuan di sektor pangan, pertanian dan kehutanan di ASEAN.....	10
2. TUJUAN	10
3. PENDEKATAN AMAF TERHADAP PENGARUSUTAMAAN GENDER.....	11
3.1 Pernyataan Kebijakan AMAF	11
3.2 Kerja Sama Pangan, Pertanian dan Kehutanan di ASEAN.....	12
3.2.1 Peternakan	12
3.2.2 Tanaman	15
3.2.3 Perikanan dan budidaya	16
3.2.4 Kehutanan	17
3.2.5 Perubahan iklim	19
3.2.6 Ketahanan pangan dan gizi.....	21
3.2.7 Mengintegrasikan gender ke dalam rantai nilai pangan, pertanian dan kehutanan.....	22
4. Strategi dan Rencana Aksi Daerah.....	23
4.1 Pengarusutamaan gender dalam pangan, pertanian dan kehutanan	23
4.2 Kerangka kerja untuk strategi pengarusutamaan gender dalam pangan, pertanian dan kehutanan.....	24
4.2.1 Pendekatan dan advokasi	24
4.2.2 Peningkatan Kapasitas	24
4.2.3 Kerangka kelembagaan.....	25
4.2.4 Membangun dan memperkuat kemitraan strategis.....	25
4.2.5 Informasi, Komunikasi dan Publisitas.....	25
4.2.6 Riset, Inovasi, dan teknologi	26
5. PROSES IMPLEMENTASI	26
DAFTAR PUSTAKA	27
Lampiran 1: Intervensi gender yang direkomendasikan dalam SPA sektoral.....	28
Rencana Strategis (SPA) Kerja Sama ASEAN Bidang Pangan, Pertanian dan Kehutanan (2016-2025)	28
SPA Kerja Sama ASEAN Bidang Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2016-2020	30
SPA Kerja Sama ASEAN Bidang Peternakan 2016-2020	31

SPA Kerja Sama ASEAN Bidang Tanaman 2016-2020.....	32
SPA Kerja Sama ASEAN Bidang Perikanan 2016-2020	33
SPA Kerja Sama ASEAN Bidang Kehutanan 2016-2025.....	35
Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN (AIFS) dan SPA Ketahanan Pangan di Kawasan ASEAN (2015-2020).....	36

1. PENGANTAR

1.1 Kesetaraan Gender di ASEAN

Di dalam konteks ASEAN, ketidaksetaraan gender dikonstruksi secara sosial dalam berbagai dimensi yang tidak hanya menghambat pembangunan manusia, tetapi juga memperdalam konflik dan kerentanan sosial. Ketimpangan gender menunjukkan bahwa perempuan memiliki keterbatasan kekuasaan di berbagai bidang kehidupan yaitu ketimpangan dalam aksesibilitas fasilitas dasar, ketimpangan profesional, kepemilikan dan ketimpangan rumah tangga yang menempatkan perempuan dalam lingkaran perempuan dalam posisi dirugikan dan rentan. Sesuai dengan rumusan kesetaraan gender, yaitu "persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan perempuan, laki-laki, dan anak perempuan dan anak laki-laki" (PBB, 2001), pemerintah negara-negara ASEAN telah berupaya mengintegrasikan isu-isu gender ke dalam pembangunan, baik melalui upaya legislatif reformasi maupun kebijakan khusus gender, termasuk mendirikan biro pemerintahan khusus sebagai mekanisme utama dalam memajukan status perempuan dan kesetaraan gender.

Pada KTT ASEAN ke-31 di Filipina, Kepala Negara atau Pemerintah ASEAN telah mengadopsi "Deklarasi ASEAN tentang Implementasi yang Responsif Gender dari Visi Komunitas ASEAN 2025 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" (*ASEAN Declaration on the Gender-Responsive Implementation of the ASEAN Community Vision 2025*). Deklarasi ini berisi komitmen pemimpin negara-negara ASEAN untuk memastikan terwujudnya ASEAN yang berorientasi dan berpusat pada rakyat; tempat semua perempuan dan anak perempuan dapat mencapai potensi mereka sepenuhnya.

Untuk memenuhi komitmen tersebut, dan dengan integrasi regional dan kapasitas pasar berskala lebih dari 600 juta orang yang menunjukkan peluang luar biasa, pemerintah negara-negara ASEAN harus memperkuat kapasitas, memperluas aksesibilitas, dan mendukung kontribusi perempuan terhadap perekonomian di ranah formal. Peningkatan tingkat partisipasi ekonomi formal akan memungkinkan perempuan untuk memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang dan fasilitas seperti lelaki, sehingga pemberdayaan perempuan dapat terpenuhi dan kesenjangan gender menyempit.

Dalam studi terbaru berjudul "Projected Gender Impact of the ASEAN Economic Community" yang dilakukan oleh Kantor Regional Perempuan PBB untuk Asia dan Pasifik dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), dalam kemitraan dengan Sekretariat ASEAN dan dengan dukungan dari Pemerintah Australia, temuan-temuan studi menunjukkan bahwa, tanpa kebijakan yang ditargetkan dan intervensi yang terprogram, perempuan sangat mungkin dikecualikan dari manfaat langsung peningkatan perdagangan, investasi dan integrasi tenaga kerja terampil. Studi menemukan bahwa langkah-langkah liberalisasi akan berdampak tidak merata karena ketidaksetaraan yang ada—termasuk yang berdasarkan pendapatan, gender, geografi, atau etnis, akses ke sumber daya, dan kepemilikan aset—akan membatasi potensi manfaat yang diperoleh perempuan dari perdagangan.

1.2 Perempuan di sektor pangan, pertanian dan kehutanan di ASEAN

Pertanian merupakan sektor ekspor utama di enam dari sepuluh Negara Anggota ASEAN: Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Negara-negara dengan sektor pertanian yang dominan ini berada pada berbagai tahap perkembangan sosial-ekonomi, namun kendala yang dihadapi para perempuan di sektor pangan, pertanian dan kehutanan di negara-negara itu amat mirip. Hampir 75 persen perempuan di Kamboja terlibat dalam pertanian, 69 persen perempuan adalah pekerja pertanian di Myanmar, diikuti oleh 48 persen di Vietnam, dan 51 persen di Laos.

Meskipun industrialisasi terus berkembang, sebagian besar subsektor pertanian dan produk agro, seperti peternakan dan kehutanan, mempekerjakan perempuan. Tingkat partisipasi perempuan di seluruh rantai nilai adalah sama, tetapi perempuan tidak mencapai tingkat ekspor secara setara.

Sektor pangan, pertanian dan kehutanan sangat rentan terhadap variabilitas iklim dan perubahan iklim. Dari perspektif gender, perempuan dan pemuda lebih rentan terhadap perubahan iklim. Petani perempuan menghadapi beberapa tantangan dalam bergerak melampaui tingkat subsisten untuk mengakses pasar ekspor di Negara-negara Anggota ASEAN. Tingkat kemiskinan perdesaan tinggi dan perempuan memikul beban kerja fisik yang tidak proporsional, baik di dalam rumah tangga maupun di pertanian.

Terlepas dari keterlibatan signifikan perempuan dalam pertanian, kepemilikan tanah dan sertifikasi serta kepemilikan aset produktif lainnya sebagian besar tetap berada di tangan laki-laki. Akses yang buruk ke pasar dan ketergantungan yang berlebihan pada tengkulak menyulitkan perempuan untuk mengakses pasar luar dan menerima harga yang wajar untuk produk mereka. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa kredit pertanian sulit diakses oleh perempuan karena kurangnya kepemilikan aset dan tingkat pendidikan yang rendah di beberapa Negara Anggota ASEAN.

2. TUJUAN

Pendekatan AMAF untuk pengarusutamaan gender di sektor pangan, pertanian dan kehutanan dikembangkan untuk membantu Negara-negara Anggota ASEAN:

- Memberikan panduan dalam memahami dan memperkenalkan kebijakan dan program yang responsif gender di tingkat daerah
- Mendorong dan mengadvokasi kesetaraan gender dalam kebijakan, program, sistem dan struktur pangan, pertanian dan kehutanan di tingkat regional dan nasional.
- Memperkuat dan membangun kapasitas pembuat kebijakan, pekerja lapangan dan petani tentang pendekatan yang tepat untuk mengintegrasikan gender dalam pertanian dan perubahan iklim
- Mendorong penelitian berkeadilan gender yang mendukung teknologi pertanian cerdas-iklim.

Pendekatan AMAF untuk pengarusutamaan gender di sektor pangan, pertanian dan kehutanan merupakan upaya tidak mengikat untuk membantu proses membangun kerja sama dan integrasi gender yang lebih kuat di kawasan, dengan bertindak sebagai pedoman acuan bersama untuk kerja sama di masa depan untuk meningkatkan kesetaraan gender di sektor pangan, pertanian dan kehutanan di ASEAN. Pendekatan AMAF mempertimbangkan konteks dan keadaan regional dan nasional.

3. PENDEKATAN AMAF TERHADAP PENGARUSUTAMAAN GENDER

3.1 Pernyataan Kebijakan AMAF

Mengakui bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan menjadi pusat Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, dan bahwa kesetaraan gender diakui dan ditegaskan sebagai prasyarat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, AMAF menegaskan kembali perlunya pengarusutamaan perspektif dan analisis gender yang mencakup tindakan dan investasi yang ditargetkan dalam perumusan dan implementasi kebijakan, rencana, dan program semua sektor pangan, pertanian, dan kehutanan di ASEAN. Hal ini sejalan dengan komitmen yang tertuang dalam Deklarasi ASEAN tentang Implementasi Responsif Gender dari Visi Komunitas ASEAN 2025.

AMAF selanjutnya mendorong peningkatan investasi untuk menutup kesenjangan sumber daya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan.

AMAF setuju untuk mendorong akses yang setara bagi dan partisipasi penuh perempuan dalam badan dan mekanisme pengambilan keputusan yang terlibat dalam pelaksanaan semua tujuan dan target Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Rencana Strategis Kerja Sama ASEAN dalam Pangan, Pertanian dan Kehutanan (2016-2025) termasuk perumusan kebijakan, rencana dan program, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi untuk sub-sektor peternakan, tanaman, perikanan dan kehutanan.

AMAF sangat mendorong Badan Sektor ASEAN terkait untuk mendorong penerapan Pendekatan AMAF terkait dengan sektor pangan, pertanian, dan kehutanan.

3.2 Kerja Sama Pangan, Pertanian dan Kehutanan di ASEAN

Secara umum, isu-isu gender yang harus diperhatikan dalam sektor pangan, pertanian, dan kehutanan adalah:

- Memastikan partisipasi setara antara perempuan dan laki-laki dalam semua diskusi kebijakan, kegiatan peningkatan kapasitas dan partisipasi dalam semua kegiatan nasional dan regional.
- Memastikan pengumpulan data gender untuk semua pengumpulan data selama fase desain, implementasi dan pemantauan dan evaluasi semua proyek/kegiatan.
- Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengakses beragam layanan keuangan, seperti pinjaman, tabungan, pengiriman uang, dan skema asuransi untuk memberi mereka kesempatan meningkatkan inisiatif pangan, pertanian dan kehutanan.
- Mendorong dan memfasilitasi akses perempuan ke pendidikan serta partisipasi mereka dalam pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan perempuan dalam hal pemasaran, perdagangan, dan bisnis.
- Memberikan pelatihan kepemimpinan untuk memperkuat dan mempertegas suara dan kepemimpinan perempuan.
- Memastikan partisipasi setara antara perempuan dan laki-laki dalam semua proses pengambilan keputusan.
- Berkoordinasi dengan badan-badan ASEAN lainnya untuk mengadvokasi pengarusutamaan gender.

3.2.1 Peternakan

Sub-sektor peternakan memberikan kontribusi penting terhadap *output* nasional, lapangan kerja, dan ketahanan pangan di kawasan ASEAN, meskipun nilai pentingnya relatif dan bervariasi di seluruh Negara Anggota ASEAN. Di bawah Kerja Sama ASEAN dalam Pangan, Pertanian dan Kehutanan, Kelompok Kerja ASEAN untuk Peternakan (ASWGL) dibentuk untuk menyediakan mekanisme bagi pengembangan Standar ASEAN dalam Peternakan untuk Vaksin, Praktik Peternakan yang Baik, dan kegiatan terkait lainnya di sub-sektor ini. Di ASEAN, produk peternakan utama adalah unggas dan babi. Pertumbuhannya cukup pesat, namun ASEAN secara keseluruhan masih merupakan pengimpor bersih dari daging dan produk susu. Thailand adalah satu-satunya negara pengekspor bersih daging dengan volume yang signifikan (terutama unggas). Namun, dalam hal daging, tingkat impor terhadap total konsumsi rendah (sekitar 5%), meskipun meningkat. Ekspansi industri peternakan juga berdampak pada peningkatan impor pakan ternak. Pangsa pertanian dalam *output* nasional menurun di AMS yang lebih maju, sementara pangsa ternak dalam pertanian meningkat. Meskipun produksi dan pemrosesan skala besar dan intensif tumbuh di AMS yang lebih maju, peternakan skala kecil masih mendominasi di AMS yang kurang berkembang; peternakan kecil inilah yang memainkan peran kunci dalam pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan nutrisi, dan kesetaraan gender.

Diperkirakan sekitar 50-85 persen dari total produksi ternak di AMS berasal dari peternak kecil. Persentasenya bervariasi antarnegara, bergantung pada beberapa faktor. Pada tingkat petani kecil, sistem produksi utamanya adalah usaha subsisten

atau usaha kecil yang berorientasi pasar, yang sebagian besar bergantung pada sumber pakan rumah tangga dan tenaga kerja. Sistem itu pun sering kali memiliki tingkat produksi yang rendah. Perempuan memainkan peran penting dalam memberi makan, membersihkan, dan mengelola ternak—terutama babi, unggas yang dikelola di pekarangan, dan ruminansia kecil—selain melakukan kegiatan rutin sehari-hari lainnya yang berkaitan dengan peran reproduksi mereka dalam rumah tangga.

Tidak seperti banyak daerah lain, perempuan di Asia Tenggara juga terlibat dalam perdagangan eceran produk ternak, terutama daging segar. Laki-laki terutama terlibat dalam membeli *input* pertanian, menjual ternak dan produk ternak, dan mengelola hewan yang lebih besar seperti sapi dan kerbau. Keterlibatan laki-laki bertambah seiring dengan meningkatnya intensifikasi pertanian dan jumlah hewan ternak.

Di seluruh ASEAN, isu gender yang terkait dengan peternakan sebagian besarnya serupa, dengan beberapa variasi yang dipengaruhi oleh budaya dan tradisi. Kendala utama yang dihadapi perempuan dalam sistem produksi dan pemasaran ternak meliputi, namun tidak terbatas pada:

- Akses terbatas ke layanan penyuluhan, kredit, teknologi, pelatihan, dan informasi
- Kurangnya kontrol dalam pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga, masyarakat, dan lembaga lokal
- Kontrol terbatas atas pendapatan dan aset dan seringnya kehilangan sebagian besar pendapatan kepada laki-laki, yang tidak menginvestasikan kembali dalam rumah tangga
- Akses, kontrol, dan kepemilikan yang buruk atas sumber daya alam, khususnya tanah
- Keterbatasan akses ke pasar
- Risiko lebih tinggi terhadap penyakit bawaan makanan dan zoonosis karena perempuan pihak utama yang menangani produk hewani mentah.

Sementara perempuan bekerja memelihara ternak, laki-laki umumnya diundang untuk menghadiri pelatihan, berbicara dengan penyuluh/pengambil keputusan, dll. Dalam prosesnya, laki-laki memiliki akses terhadap pengetahuan dan keterampilan terkait ternak yang biasanya tidak dimiliki oleh perempuan, sehingga mengakibatkan minimnya transfer pengetahuan dan teknologi. Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga sosial lokal dan mekanisme pemberian layanan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah juga mempersulit akses ke pengetahuan dan layanan bagi perempuan perdesaan. Akibat sedikit atau nihilnya kepemilikan tanah di kalangan perempuan, perempuan mengalami kesulitan mengakses kredit, sehingga ruang lingkup untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan mereka menjadi terbatas. Tampaknya, perempuan di Asia Tenggara memiliki kapasitas tawar yang lebih bervariasi di pasar bergantung pada lokasi, tradisi dan budaya.

Namun, dalam hal akses pasar, perempuan perdesaan menghadapi sejumlah kendala karena tingkat melek huruf dan keterampilan pemasaran yang lebih rendah, serta keterbatasan untuk bergerak di luar rumah (praktik adat yang mencegah mereka meninggalkan rumah, keterampilan mengemudi yang buruk). Hal ini perlu diatasi untuk meningkatkan akses serta daya tawar mereka di pasar.

Laki-laki memiliki kontrol yang lebih besar atas pendapatan dan aset yang berasal dari ternak daripada perempuan, sehingga mengurangi kesempatan perempuan untuk memperoleh kemandirian ekonomi dalam keluarga. Pada beberapa kasus, pendapatan yang diterima dari ternak disalahgunakan oleh laki-laki, dan tidak menguntungkan keluarga. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan juga perlu ditingkatkan, tidak hanya pada tingkat rumah tangga tetapi juga pada tingkat masyarakat. Peningkatan pilihan pengambilan keputusan akan mendorong pembentukan lingkungan yang lebih kondusif bagi perempuan untuk memiliki pilihan yang sama dengan laki-laki. Dengan munculnya/kembalinya penyakit zoonosis, perempuan lebih berisiko terhadap penyakit (misalnya *brucellosis*, tuberkulosis) karena hubungan yang lebih dekat dengan ternak yang dikelola di bawah lingkungan dengan ketahanan hayati yang buruk dan karena penanganan/penyiapan produk ternak mentah oleh perempuan.

Menurut FAO, terdapat tujuh kategori tantangan utama yang dihadapi petani kecil dan khususnya petani perempuan: Akses dan kontrol atas sumber daya alam; Pembagian peran dan tanggung jawab berdasarkan jenis kelamin dan usia; Akses ke teknologi, pelatihan dan layanan penyuluhan; Akses ke layanan keuangan; Akses ke pasar; Partisipasi dan kekuatan pengambilan keputusan; Kesehatan dan keselamatan kerja (FAO 2013)

Rencana Aksi Strategis (SPA) untuk Kerja Sama ASEAN bidang Peternakan 2016-2020 Dorongan Strategis 4: Mendukung ternak kecil untuk pengentasan kemiskinan, perbaikan gizi, ketahanan pangan dan kesetaraan gender, termasuk beberapa kegiatan yang berfokus pada kesetaraan gender. Isu-isu gender berikut harus dipertimbangkan sesuai dengan tujuh kategori tantangan FAO ketika merumuskan kebijakan/program di bawah SPA untuk Kerja sama ASEAN di Peternakan 2016-2020:

- Memperkuat keterampilan teknis perempuan dengan secara sistematis memfasilitasi penyertaan perempuan dalam pelatihan praktik peternakan serta pengolahan dan pemasaran produk ternak—memastikan bahwa sesi pelatihan juga diberikan di desa-desa dan masyarakat perdesaan kecil.
- Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengakses layanan keuangan yang berbeda seperti kredit, tabungan, pengiriman uang dan skema asuransi untuk memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan produksi ternak mereka.
- Mendorong dan memfasilitasi akses perempuan ke pendidikan serta partisipasi mereka dalam pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pemasaran, perdagangan, dan bisnis perempuan.
- Memberikan pelatihan kepemimpinan untuk memperkuat dan mempertegas suara dan kepemimpinan perempuan dalam koperasi petani dan organisasi produsen
- Mengakui dimensi gender dari risiko kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya paparan penyakit zoonosis, seperti *High Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) dan bahaya lain yang terkait dengan penanganan daging mentah dan produk susu.

3.2.2 Tanaman

ASEAN Sectoral Working Group on Crops (ASWGC) adalah salah satu badan di bawah SOM-AMAF yang membawahi Kerja Sama ASEAN bidang Sub-Sektor Tanaman. Dengan tujuan mendorong pembangunan di subsektor ini, ASWGC telah melaksanakan kegiatan dan proyek sesuai dengan tujuan strategisnya, yang tercermin dalam Rencana Aksi (SPA) Tanaman. Sejumlah kegiatan/proyek telah berhasil dilaksanakan dan banyak yang dilanjutkan melalui penataan jejaring serta didukung oleh dialog dan mitra pembangunan. Ruang lingkup ASWGC meliputi: i) kerangka kebijakan, ii) perdagangan komoditas tanaman intra dan ekstra-ASEAN, iii) pengendalian hama dan penyakit tanaman, iv) pengembangan standar dan promosinya, v) perlindungan lingkungan dalam produksi tanaman, dan vi) ketahanan pangan, keamanan pangan dan gizi.

Meningkatnya peran perempuan dalam sistem pangan dan tanaman menempatkan mereka sebagai pemain dan mitra penting dalam proses ini. Di ASEAN, perempuan menyumbang lebih dari 50% angkatan kerja pertanian. Petani perempuan dan laki-laki memiliki peran yang berbeda terkait dengan produksi tanaman, tetapi dengan latar belakang perubahan peluang ekonomi dan kondisi lingkungan, pembagian kerja karena gender dapat berubah. Petani perempuan dan laki-laki sering kali memiliki kriteria yang berbeda untuk memilih tanaman dan varietas dan melakukan kegiatan seperti memilih benih, budidaya, panen dan pengolahan. Kriteria ini mungkin didasarkan pada perbedaan rasa, karakteristik penyimpanan, waktu yang dibutuhkan untuk persiapan makanan, kebutuhan tenaga kerja dan daya jual. Perempuan juga sering tidak memiliki kepastian hak atas lahan dan hak atas sumber daya serta akses ke sumber daya, seperti tanah, keuangan, informasi, layanan penyuluhan dan teknologi. Menutup kesenjangan gender dalam akses dan penggunaan sumber daya dan layanan produktif akan membuka potensi produktivitas pertanian perempuan, sehingga meningkatkan hasil pertanian secara substansial. Studi tentang kesenjangan hasil antara petani laki-laki dan perempuan memberikan perkiraan kesenjangan rata-rata 20-30 persen, dan sebagian besar studi menghubungkan kesenjangan dengan penggunaan *input* yang lebih rendah oleh perempuan. Menurut perkiraan FAO, peningkatan produktivitas yang dihasilkan dari memastikan akses yang sama ke pupuk, benih, dan alat pertanian bagi perempuan, dapat meningkatkan total hasil pertanian di negara-negara berkembang sekitar 2,5 hingga 4 persen, sehingga mengurangi jumlah orang yang kelaparan antara 100 juta dan 150 juta (FAO, 2011).

Isu-isu gender berikut harus dipertimbangkan ketika melaksanakan proyek/kegiatan di bawah SPA untuk Kerjasama ASEAN dalam Tanaman 2016-2020:

- Lakukan analisis gender dalam semua proyek, program, dan kebijakan untuk menilai implikasi dan manfaat teknologi dan praktik Pertanian Cerdas Iklim (CSA) pada laki-laki dan perempuan.
- Memberikan dukungan khusus kepada UKM dan koperasi yang dipimpin perempuan untuk meningkatkan produktivitas, teknologi dan kualitas produk, untuk memenuhi standar pasar global dan meningkatkan daya saing.
- Memberikan pelatihan kepada perempuan dan laki-laki tentang teknologi dan praktik CSA, dan kesadaran gender.

- Memfasilitasi akses perempuan ke tanah dan kredit melalui transformasi hukum dan praktik lokal.
- Meningkatkan kapasitas perempuan dan laki-laki anggota organisasi dan lembaga petani perempuan dan laki-laki petani untuk terlibat dengan sektor swasta.

3.2.3 Perikanan dan budidaya

Sektor perikanan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Enam Negara ASEAN—Indonesia, Myanmar, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia—termasuk di antara negara-negara penghasil ikan terbesar di dunia, sementara empat negara—Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam—termasuk di antara negara-negara penghasil rumput laut terbesar di dunia. Sekitar 60 juta orang bekerja di jasa penunjang terkait perikanan seperti pembuatan kapal, pembuatan alat tangkap, pengolahan dan pemasaran ikan. Konsumsi ikan per kapita (33,4 kg/tahun) di kawasan ASEAN jauh lebih tinggi dari rata-rata dunia (19,2 kg/tahun) dan sekitar 38% protein hewani yang dikonsumsi di kawasan ini berasal dari ikan, yang menyoroti pentingnya perikanan di gizi dan ketahanan pangan di wilayah tersebut. ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGF) bertugas untuk mengawasi identifikasi, perumusan, pemantauan dan pelaporan kerja sama perikanan antar-AMS.

Mengakui isu-isu gender ini, Pedoman Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan (*Sustainable Small-Scale Fisheries/SSF*) memasukkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai salah satu dari 13 prinsip panduannya. Gender juga dipertimbangkan di bagian yang lebih rinci tentang perikanan yang bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan (FAO 2015). Pedoman SSF mengakui bahwa tenaga kerja perikanan perempuan dan laki-laki sering diberikan nilai budaya dan ekonomi yang berbeda, dengan pekerjaan perempuan sering tidak diperhitungkan dan tidak dipertimbangkan dalam tata kelola perikanan, meskipun penting untuk perikanan skala kecil. Pedoman SSF juga mengakui sentralitas gender untuk isu-isu lain yang saling bersinggungan, khususnya hak asasi manusia dan kesejahteraan, ketahanan pangan, dan perubahan iklim. Selain itu, pedoman SSF menyoroti perbedaan gender dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam konteks perikanan skala kecil dan pengaruh perbedaan tersebut terhadap tata kelola perikanan skala kecil yang representatif, adil, dan berkelanjutan.

Intervensi yang membatasi peran perempuan dalam sistem perikanan dan akuakultur berdasarkan peran reproduksi dan ekonomi yang ada sebenarnya dapat mempertahankan *status quo* yang mungkin sangat tidak adil bagi perempuan perdesaan dan masyarakat adat.

Isu-isu gender berikut harus dipertimbangkan ketika menerapkan SPA untuk Kerja Sama ASEAN di bidang perikanan 2016-2020:

- Memberdayakan perempuan dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat melalui peningkatan kapasitas di berbagai masalah teknis dan hukum.

- Memberikan nelayan akses ke sumber daya perikanan, pasar, keuangan, dan sumber daya pemasaran
- Mendorong advokasi upah yang sama untuk tenaga kerja perikanan.
- Mendorong penguatan kemampuan serikat dan organisasi perempuan melalui mekanisme alokasi sumber daya dan dengan meningkatkan tanggung jawab manajemen mereka.
- Mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan lain yang terkait dengan perikanan budidaya non-daratan dan hilir seperti produksi benih dan pengumpulan serta pemrosesan pakan dan produk perairan.
- Pantau perubahan dalam pengelolaan sumber daya untuk menilai sejauh mana kerangka kerja formal dan informal yang ada memungkinkan perwakilan, suara, klaim, dan peluang perempuan dalam perikanan untuk menentukan prioritas perubahan.
- Pastikan dukungan untuk penelitian tentang gender dalam perikanan.

3.2.4 Kehutanan

Hutan memainkan peran penting dalam produksi kayu dan produk lainnya dan menyediakan rumah bagi sejumlah besar orang di sub-kawasan ini dan menawarkan pekerjaan, antara lain, produksi furnitur dan produk kayu lainnya, kawasan lindung pengelolaan, dan pengembangan perkebunan. Hutan penting bagi masyarakat lokal, adat, dan pedesaan karena menyediakan makanan, energi, dan tempat tinggal bagi jutaan dari mereka di kawasan ASEAN.

ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF) adalah badan yang bertanggung jawab atas kerja sama kehutanan di ASEAN. ASOF telah menetapkan visi kerja sama yang menyebutkan, "Sumber daya hutan dikelola secara lestari pada tingkat lanskap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik sosial-ekonomi dan budaya, generasi sekarang dan mendatang, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan". Tujuan sektor kehutanan di ASEAN adalah untuk "meningkatkan pengelolaan hutan lestari untuk produksi barang dan jasa hutan yang berkelanjutan secara seimbang dan memastikan perlindungan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, serta mengoptimalkan pemanfaatannya agar sejalan dengan keberlanjutan sosial dan ekologi.

Di seluruh Asia Tenggara, sebanyak 300 juta orang tinggal di daerah pedesaan dan hingga 70 juta orang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian, nutrisi, dan ketahanan pangan mereka. Laki-laki dan perempuan sering kali berbeda dalam menggunakan dan bergantung pada hasil hutan non-kayu, dengan perempuan sering kali secara tidak proporsional mengandalkan produk-produk ini. Perempuan berkontribusi pada sektor kehutanan dalam banyak cara, baik formal maupun informal, termasuk melalui agroforestri, pengelolaan daerah aliran sungai, perbaikan pohon dan perlindungan hutan. Perempuan merupakan proporsi yang signifikan dari angkatan kerja di industri kehutanan di seluruh dunia, terutama dalam pekerjaan pembibitan pohon tetapi juga dalam kegiatan mulai dari penebangan hingga pengolahan kayu. Meskipun perempuan berkontribusi besar pada sektor kehutanan, peran mereka tidak sepenuhnya diakui atau didokumentasikan, dan upah serta kondisi kerja mereka biasanya lebih rendah daripada laki-laki. Terlebih lagi, perempuan jarang memiliki keterlibatan yang setara dengan laki-laki dalam

perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kehutanan. Ada juga dampak deforestasi yang dibedakan berdasarkan gender: bagi laki-laki, deforestasi dapat menyebabkan hilangnya pendapatan, sedangkan bagi perempuan, hal itu dapat meningkatkan beban kerja mereka, terutama dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kayu bakar.

Pengaturan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dapat mempengaruhi secara berbeda hak perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya hutan dan memiliki tanah. Bahkan ketika perempuan memiliki hak kepemilikan atas hutan, mereka mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap peluang pendapatan yang dihasilkan dari hutan. Umumnya, perempuan mungkin memiliki akses ke HHBK tetapi tidak ke sumber daya kayu, yang seringkali merupakan domain laki-laki dan juga produk yang paling bernilai komersial di sebagian besar hutan. Diferensiasi gender ini memiliki implikasi besar bagi pengelolaan hutan dan juga struktur kekuasaan berbasis gender di masyarakat. Sebuah studi yang dilakukan oleh Bank Dunia menemukan bahwa memberi perempuan suara yang lebih besar dalam mengelola hutan secara signifikan meningkatkan hasil konservasi (Bank Dunia 2012).

Pemangku kepentingan penting lainnya adalah masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan yang bergantung pada hutan untuk kelangsungan hidupnya. Bank Dunia memperkirakan ada sekitar 60 juta masyarakat adat yang bergantung pada hutan--angka yang menurut para peneliti terlalu rendah (Tauli-Corpuz, 2011). Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) sepenuhnya mengakui pentingnya tanah, wilayah, dan sumber daya bagi Masyarakat Adat. Hal ini lebih lanjut ditekankan oleh pengakuan hak Masyarakat Adat atas Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) sebagai persyaratan untuk melindungi hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Perempuan adat adalah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan pentingnya pengetahuan, nilai dan praktik tradisional mereka, serta kebutuhan untuk secara kolektif membangun dari yang tersisa untuk mendorong ketahanan masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Isu-isu gender berikut harus dipertimbangkan dalam penerapan SPA untuk Kerjasama ASEAN di bidang Kehutanan 2016-2025:

- Mendorong AMS untuk mengekspresikan kebijakan kehutanan yang responsif gender dalam hal hak kepemilikan, hak akses, dan keterwakilan dalam peluang pengembangan kapasitas.
- Memulai dialog dan mengatur pertemuan konsultasi di tingkat nasional dan daerah untuk membahas isu-isu gender yang relevan dan kesenjangan dalam kebijakan dan praktik kehutanan yang ada
- Melibatkan organisasi masyarakat sipil, organisasi berbasis masyarakat, lembaga pemerintah, dan jaringan perempuan yang relevan untuk memastikan pendekatan inklusif terhadap pengembangan dan implementasi kebijakan kehutanan yang responsif gender
- Menyelenggarakan seminar dan lokakarya kesadaran gender untuk pejabat kehutanan, termasuk pembuat keputusan dan anggota komite kebijakan, untuk memastikan pemahaman yang lebih dalam tentang relevansi keprihatinan perempuan dalam kebijakan dan program kehutanan

- Memperkuat kapasitas lembaga yang bekerja di bidang gender dan *focal point* bidang gender di lembaga itu untuk terlibat pada tingkat substantif dalam konsultasi terkait kehutanan dan dalam tinjauan kebijakan dan proses pembangunan
- Mendorong konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam struktur manajemen yang ada untuk menentukan ketidakseimbangan kekuatan gender dan untuk memfasilitasi pembentukan lembaga kehutanan yang lebih seimbang gender. Hal ini penting untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam peran kepemimpinan dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan
- Analisis tren pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya persentase perempuan dengan pendidikan terkait kehutanan, serta tingkat perekrutan dan retensi perempuan di sektor kehutanan.
- Memastikan pembagian manfaat yang adil (misalnya pembayaran untuk jasa lingkungan) antara perempuan dan laki-laki, jika relevan.
- Memberdayakan perempuan dengan membangun kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam skema rehabilitasi/restorasi lahan hutan.
- Memantau kebijakan hutan dari perspektif gender dalam kerangka kerja baru untuk tata kelola hutan.

3.2.5 Perubahan iklim

Asia Tenggara sangat rentan terhadap perubahan iklim karena sebagian besar populasi dan kegiatan ekonomi terkonsentrasi di sepanjang garis pantai; wilayah ini sangat bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian; terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam dan kehutanan; dan tingkat kemiskinan ekstrem masih tinggi. Perempuan di negara berkembang sangat rentan terhadap perubahan iklim karena mereka sangat bergantung pada sumber daya alam lokal untuk mata pencaharian mereka. Perempuan yang ditugaskan untuk menyediakan air, makanan dan bahan bakar untuk memasak dan sebagai sumber pemanas menghadapi tantangan terbesar. Perempuan mengalami akses yang tidak setara ke sumber daya dan proses pengambilan keputusan, dengan mobilitas terbatas di daerah perdesaan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi strategi sensitif gender yang merespons beragam krisis ini untuk perempuan.

Perempuan dan laki-laki memiliki akses yang berbeda ke sumber daya (tanah, kredit, teknologi pertanian, dll.) untuk mengatasi dampak perubahan iklim: saat sumber daya yang dimiliki perempuan lebih sedikit daripada laki-laki, kerentanan perempuan meningkat dan kapasitas mereka untuk beradaptasi dengan perubahan iklim menjadi lebih lemah. Langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (misalnya mekanisme perlindungan sosial, skema asuransi berbasis cuaca, prakiraan iklim musiman, dan langkah-langkah yang terkait dengan hutan atau penyimpanan karbon tanah) sering kali tidak membahas masalah gender, khususnya kendala perempuan untuk berpartisipasi dalam langkah-langkah ini. Perempuan umumnya menghadapi risiko yang lebih tinggi dalam menanggapi bahaya alam dan beban yang lebih besar dari dampak perubahan iklim. Meskipun perempuan memiliki pengetahuan lokal yang mendalam dan merupakan pengelola dari sumber-sumber daya alam bersama, perempuan juga sering diabaikan dalam pengambilan keputusan aksi iklim.

Pada Konferensi tahunan Para Pihak (COP23), yang diselenggarakan dari 6 – 17 November 2017 di Bonn, Jerman, Negara-Negara Anggota mengadopsi peta jalan baru untuk memasukkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam wacana dan aksi perubahan iklim. Pada COP22, Para Pihak menyepakati penyusunan “Rencana Aksi Gender” untuk mendukung peran perempuan dalam aksi iklim. Tujuan Rencana Aksi Gender adalah memastikan bahwa perempuan dapat memengaruhi keputusan terkait perubahan iklim, dan bahwa perempuan dan laki-laki terwakili secara setara dalam semua aspek Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebagai cara untuk meningkatkan efektivitasnya. Rencana Aksi Gender menetapkan, melalui lima bidang prioritas, kegiatan-kegiatan yang akan membantu mencapai tujuan ini.

- Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas perempuan dan laki-laki melalui lokakarya dan pertukaran informasi
- Meningkatkan partisipasi perempuan yang setara dan bermakna dalam delegasi nasional
- Meningkatkan integrasi pertimbangan gender—seperti menangani kerentanan yang secara khusus dialami perempuan saat bencana alam, memahami peran perempuan dalam pertanian dan produksi pangan, dan mendukung pengusaha perempuan di sektor energi—ke dalam bidang kerja semua Pihak Konvensi
- Meningkatkan sumber daya keuangan terkait iklim yang mengintegrasikan prioritas gender dan mencerminkan kebutuhan perempuan dan anak perempuan.
- Meningkatkan pelacakan implementasi keputusan terkait gender.

Kelompok Kerja ASEAN untuk Perubahan Iklim (AWGCC) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan garis aksi yang relevan dalam Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC). Salah satu tujuan Cetak Biru ASCC 2025 adalah untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan untuk beradaptasi dan merespons kerentanan sosial dan ekonomi, bencana, perubahan iklim serta ancaman dan tantangan yang muncul.

Isu-isu gender berikut ini harus dipertimbangkan ketika mengimplementasikan Cetak Biru ASCC 2025.

- Melakukan analisis mendalam dan berbasis bukti tentang peran perempuan dan laki-laki di sektor-sektor yang terdampak dan strategi mereka untuk mengatasi perubahan iklim
- Mengintegrasikan perspektif gender di seluruh program perubahan iklim untuk secara efektif menangani kebutuhan dan prioritas perempuan dan laki-laki, memastikan partisipasi penuh dan bermakna dari perempuan dan mencapai hasil yang setara gender
- Memastikan upaya mitigasi dan adaptasi untuk mengatasi sumber kerentanan berbasis gender, ketidaksetaraan gender dan kemiskinan

Memasukkan perspektif gender ke dalam mekanisme dan strategi pendanaan peluang iklim nasional dan internasional.

3.2.6 Ketahanan pangan dan gizi

ASEAN telah berusaha memastikan ketahanan pangan bagi kawasan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Sebagai pengakuan atas perubahan cepat di pasar global dan dampaknya terhadap sektor pertanian dan kehutanan, serta perubahan struktural dalam sektor-sektor ini karena industrialisasi, Hanoi Plan of Action (HPA) dan penggantinya, Vientiane Action Program (VAP) pada Sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan, telah menyerukan “Peningkatan Ketahanan Pangan dan Daya Saing Global Produk Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN melalui pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan dengan mendorong perdagangan intra dan ekstra-ASEAN dan investasi sektor swasta yang lebih besar di sektor pangan, pertanian dan kehutanan”.

Kerawanan pangan dan gizi merupakan isu keadilan gender. Status yang rendah dan kurangnya akses ke sumber daya berarti bahwa perempuan dan anak perempuan paling dirugikan oleh proses ekonomi global yang tidak adil yang mengatur sistem pangan dan oleh tren global seperti perubahan iklim. Bukti menunjukkan korelasi kuat antara ketidaksetaraan gender dan kerawanan pangan dan gizi. Relasi gender antara laki-laki dan perempuan merupakan penentu penting kerentanan terhadap kerawanan pangan dan malnutrisi. Diskriminasi gender dalam alokasi sumber daya rumah tangga, termasuk yang terkait dengan gizi, dapat mengakibatkan peningkatan angka malnutrisi di kalangan perempuan dan anak perempuan: hal yang dapat diperparah pada saat krisis. Kerentanan yang lebih besar terhadap kerawanan pangan pada saat krisis memperparah masalah kerawanan pangan.

Analisis Institute of Development Studies (IDS 2014), tentang Gender dan Ketahanan Pangan menekankan perlunya pembuat kebijakan dan program ketahanan pangan dan gizi untuk melampaui fokus pada pilar pertama, yaitu memastikan ketersediaan pangan di negara-negara miskin melalui strategi 'jangka pendek', bantuan pangan, dan strategi jangka panjang yang menekankan pada peningkatan produksi pertanian; strategi-strategi ini bergantung pada model industri dan liberalisasi perdagangan. 'Empat pilar' ketahanan pangan—ketersediaan, akses, pemanfaatan dan stabilitas—yang diidentifikasi pada KTT Dunia tentang Ketahanan Pangan pada tahun 2009 memberikan titik masuk yang berguna untuk analisis yang lebih komprehensif tentang masalah kerawanan pangan dan untuk mengatasi masalah kebijakan saat ini yang tidak memadai.

Isu-isu gender berikut harus dipertimbangkan ketika menerapkan Kerangka Kerja Ketahanan Pangan ASEAN yang terintegrasi tentang Ketahanan Pangan 2015-2020:

- Meningkatkan koherensi antara kebijakan gender, pertanian, gizi, kesehatan, perdagangan dan bidang terkait lainnya, melalui proses nasional dan regional;
- Mengakui dan menghormati pengetahuan lokal petani, termasuk petani perempuan, untuk mengembangkan solusi ketahanan pangan dan gizi yang relevan secara lokal yang berkeadilan gender;
- Mengembangkan pendekatan yang berwawasan lingkungan untuk produksi pangan, seperti agroekologi, yang mendorong pertanian berkelanjutan dan pemberdayaan perempuan;

- Mendorong pelaksanaan hak semua orang atas pangan dan, khususnya, hak perempuan atas sumber daya lain, seperti tanah, di tingkat lokal; dan
- Melibatkan perempuan dan laki-laki anggota koperasi petani dan UKM dalam menyanggah distribusi makanan yang tidak adil

3.2.7 Mengintegrasikan gender ke dalam rantai nilai pangan, pertanian dan kehutanan

Menutup "kesenjangan gender" di bidang pertanian dapat menghasilkan keuntungan produksi yang besar: laporan FAO tentang Situasi Pangan dan Pertanian 2010-2011 menyatakan bahwa hasil panen perempuan dapat tumbuh sebesar 20-30 persen jika kesenjangan gender dalam mengakses *input* pertanian diatasi; peningkatan ini dapat meningkatkan total hasil pertanian di negara berkembang sebesar 2,5-4 persen, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah orang yang mengalami rawan pangan di dunia sebesar 12-17 persen (FAO, 2011). Dalam konteks ini, integrasi aspek gender ke dalam pengembangan rantai nilai pangan pertanian tidak hanya diperlukan dari perspektif hak asasi manusia, melainkan merupakan prasyarat untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di bidang-bidang intervensi.

Program rantai nilai yang dirancang dengan prinsip kesetaraan gender dapat mencakup daya saing dan kesetaraan gender dan mengarah pada pengurangan kemiskinan. Pemetaan hubungan dan peran gender di sepanjang rantai nilai adalah hal yang penting.

Proses ini didasarkan pada pemahaman yang akurat tentang hubungan gender yang ada dalam konteks negara tertentu dan untuk produk pangan, pertanian, dan kehutanan tertentu. Proses yang sama juga perlu mencakup pemetaan partisipasi dan manfaat laki-laki dan perempuan di sepanjang rantai dan mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk pola gender dalam operasi rantai nilai. Dinamika gender terkait erat dengan siklus pengembangan rantai nilai: efisiensi rantai nilai sangat bergantung pada keterkaitan yang kuat dan kolaborasi positif di antara para aktor, dan perempuan adalah pemangku kepentingan penting di sepanjang rantai nilai, meskipun sering tidak terlihat atau diabaikan.

Kerangka Rantai Nilai Sensitif Gender (GSVC) FAO berfokus pada tingkat individu dan mengungkap kendala berbasis gender sebagai penyebab utama inefisiensi rantai nilai. GSVC bertujuan mengidentifikasi kendala berbasis gender di setiap simpul rantai nilai, seperti partisipasi di dalam rantai nilai, akses dan kontrol atas sumber daya produktif, serta akses dan kontrol atas manfaat (FAO 2016).

Isu-isu gender berikut harus dipertimbangkan ketika mengintegrasikan gender ke dalam rantai nilai pertanian:

- Melakukan penelitian untuk memahami peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam rantai nilai pertanian
- Menangani kebutuhan peningkatan kapasitas perempuan dalam rantai nilai pertanian
- Mendukung kemajuan ekonomi perempuan
- Mendorong solusi berbasis pasar yang adil gender

- Rancang mekanisme pembagian manfaat yang adil
- Melibatkan perempuan dalam mendefinisikan masalah dan solusinya
- Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan akses ke *input* pertanian dan informasi pasar
- Membantu kelompok perempuan untuk membeli peralatan bagi perluasan kegiatan pengolahan
- Membantu perempuan untuk mengatasi hambatan mobilitas dan hambatan sosial
- Mendorong lebih banyak perusahaan milik perempuan untuk bergabung dengan asosiasi perdagangan
- Mengatasi lingkungan kerja/ruang kerja yang lebih aman untuk kesejahteraan perempuan

4. Strategi dan Rencana Aksi Daerah

4.1 Pengarusutamaan gender dalam pangan, pertanian dan kehutanan

Terdapat perspektif gender yang penting dalam semua aspek pangan, pertanian dan kehutanan. Ketidaksetaraan gender dalam akses ke sumber daya, termasuk tanah, kredit, layanan penyuluhan, informasi dan teknologi, harus diperhitungkan dalam mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan pangan, pertanian, dan kehutanan. Perempuan merupakan kelompok masyarakat miskin dalam jumlah besar yang sangat bergantung pada sumber daya alam lokal untuk mata pencaharian mereka dan sangat rentan dan terpengaruh oleh perubahan iklim. Perempuan di daerah perdesaan di negara berkembang memiliki tanggung jawab utama di ranah rumah tangga untuk menyediakan air dan sumber energi untuk memasak dan kebutuhan pemanas, serta untuk ketahanan pangan; mereka mengalami pengaruh negatif kekeringan, curah hujan yang tidak menentu, dan deforestasi.

Peran perempuan, akses yang tidak setara ke sumber daya, dan keterbatasan mobilitas, menyebabkan perempuan dalam banyak konteks mengalami dampak terberat dari bencana alam, seperti banjir, kebakaran, dan tanah longsor. Penting untuk mengidentifikasi strategi sensitif gender untuk menanggapi krisis lingkungan dan kemanusiaan yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Negara-negara Anggota ASEAN harus didorong untuk mengarusutamakan perspektif gender ke dalam kebijakan nasional, rencana aksi, dan langkah-langkah lain tentang pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, dengan melakukan analisis gender yang sistematis, mengumpulkan dan memanfaatkan data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, menetapkan indikator dan tolok ukur sensitif gender, dan mengembangkan alat-alat praktis untuk mendukung peningkatan perhatian pada perspektif gender. Konsultasi dengan dan partisipasi perempuan dalam inisiatif perubahan iklim harus dipertimbangkan dan peran kelompok dan jaringan perempuan diperkuat.

4.2 Kerangka kerja untuk strategi pengarusutamaan gender dalam pangan, pertanian dan kehutanan

Pendekatan pengarusutamaan gender dalam pangan, pertanian dan kehutanan mengidentifikasi tujuan strategis keseluruhan sebagai: "Memfasilitasi dan mendorong kebijakan, struktur dan program pertanian ketahanan untuk mendorong kesetaraan gender menuju pembangunan berkelanjutan pada tahun 2025".

4.2.1 Pendekatan dan advokasi

Tujuannya adalah mendorong dan mengadvokasi kesetaraan gender dalam kebijakan, program, sistem dan struktur pangan, pertanian dan kehutanan di tingkat regional dan nasional. Untuk itu, kegiatan berikut dapat dipertimbangkan:

- Mengintensifkan kolaborasi yang relevan dan berbagi informasi dengan badan-badan regional dan nasional, organisasi dan mitra pembangunan yang bekerja di bidang gender
- Melakukan advokasi kesetaraan gender dalam kebijakan pangan, pertanian dan kehutanan dengan manajemen tingkat atas di kelompok kerja sektoral ASEAN yang relevan
- Mendorong berbagi pengalaman dan pelajaran dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengambil bagian dalam forum regional dan internasional yang relevan tentang pangan, pertanian dan kehutanan
- Memastikan partisipasi yang efektif dari pakar gender dan organisasi perempuan dalam proses konsultatif untuk perumusan strategi dan kebijakan adaptasi dan mitigasi di bidang pangan, pertanian dan kehutanan
- Mendorong pertanian konservasi dan pertanian cerdas iklim dan kegiatan terkait (pertanian berkelanjutan) yang mengintegrasikan petani kecil laki-laki dan perempuan yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan gender
- Mendorong produksi materi dan publikasi dengan tujuan mengatasi stereotip berbasis gender dan ketidakadilan budaya dalam pangan, pertanian dan kehutanan
- Mendorong lingkungan yang memungkinkan untuk pengarusutamaan gender dalam pangan, pertanian dan kehutanan.
- Mengidentifikasi kebijakan gender yang ada pada tingkat regional dan nasional

4.2.2 Peningkatan Kapasitas

Tujuannya adalah memperkuat dan membangun kapasitas pembuat kebijakan, pekerja lapangan dan petani tentang pendekatan yang tepat untuk mengintegrasikan gender dalam pertanian dan perubahan iklim. Kegiatan berikut dapat dipertimbangkan:

- Melakukan penilaian terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas dari semua pemangku kepentingan
- Mendukung Negara Anggota untuk mengembangkan modul pelatihan tentang pertanian cerdas iklim dan gender
- Mendukung Negara Anggota untuk mengembangkan kapasitas mekanisme penilaian dampak gender.
- Mendorong pelatihan penyuluh pertanian perempuan

- Memfasilitasi pengembangan sistem dan basis data sensitif gender untuk mengkonsolidasikan pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan khususnya pada sistem produksi pertanian
- Memfasilitasi peningkatan kapasitas tim pelatih/orang-orang fokus pada pertanian cerdas iklim dan gender.

4.2.3 Kerangka kelembagaan

Tujuannya adalah memperkuat hubungan antara organisasi regional dan lembaga nasional yang bertanggung jawab atas gender, pertanian dan perubahan iklim di tingkat regional dan nasional. Kegiatan berikut dapat dipertimbangkan:

- Mengembangkan analisis situasi terhadap lembaga regional dan nasional terpilih untuk menentukan kapasitas mereka dan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam inisiatif pertanian dan perubahan iklim.
- Mendorong pertukaran praktik terbaik lembaga dan organisasi yang mendukung kepemimpinan perempuan petani dalam koperasi dan asosiasi petani
- Memperkuat peningkatan partisipasi mesin gender nasional dan pengarusutamaan gender dalam pengembangan kerangka kerja pertanian dan investasi nasional
- Penguatan struktur organisasi dari tingkat nasional hingga lokal, harmonisasi dan lokalisasi rencana, serta peningkatan mekanisme pemantauan dan evaluasi.

4.2.4 Membangun dan memperkuat kemitraan strategis

Tujuannya adalah menciptakan dan memperkuat kemitraan strategis dan hubungan tripartit di tingkat internasional dan regional termasuk kemitraan antara pemerintah dengan pelaku usaha. Kegiatan berikut dapat dipertimbangkan:

- Melakukan *study tour*/kunjungan untuk belajar dan berbagi pengalaman tentang inisiatif gender, pertanian dan perubahan iklim
- Menyediakan platform untuk mengidentifikasi dan melibatkan sumber dana potensial khusus untuk kegiatan pengarusutamaan gender

4.2.5 Informasi, Komunikasi dan Publisitas

Tujuannya adalah membangun sistem manajemen informasi yang berfokus pada gender, pertanian dan perubahan iklim. Kegiatan berikut dapat dipertimbangkan:

- Meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan informasi pertanian dan perubahan iklim yang memadai terutama yang menargetkan perempuan, pemuda dan laki-laki
- Mengembangkan sistem manajemen informasi berbasis pengetahuan yang berfokus pada gender, pertanian, dan perubahan iklim
- Menetapkan dan menyebarkan informasi dan materi sensitif gender tentang pertanian dan perubahan iklim

4.2.6 Riset, Inovasi, dan teknologi

Tujuannya adalah untuk mendorong penelitian berkeadilan gender yang mendukung teknologi pertanian cerdas iklim. Kegiatan berikut dapat dipertimbangkan:

- Melakukan studi *baseline* tentang gender, praktik dan teknologi pertanian konservasi di Negara-negara Anggota.
- Memperkuat penelitian untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif tentang aspek gender pertanian dan perubahan iklim untuk mendukung pertanian cerdas iklim.
- Mengintensifkan penelitian dan pengembangan kolaboratif dan partisipatif termasuk peningkatan teknologi, informasi dan sistem pengetahuan yang relevan dan tepat untuk memastikan bahwa masalah kesetaraan gender ditangani.

5. PROSES IMPLEMENTASI

Rekomendasi-rekomendasi dalam Pendekatan AMAF menjadi pedoman acuan bagi AMS dalam upaya mereka untuk mendorong kesetaraan gender di sektor pangan, pertanian dan kehutanan. SOM-AMAF, dengan dukungan dari ATWGARD, ASWGL, ASWGC, ASWGFi, ASOF dan Kelompok Kerja terkait lainnya dapat memperhatikan, sejauh relevan, rekomendasi dalam Pendekatan AMAF. ATWGARD, dalam koordinasi yang erat dengan Sekretariat ASEAN mungkin perlu mencari dukungan dari mitra ASEAN dan pemangku kepentingan yang berbeda dalam penerapan Pendekatan AMAF sebagai panduan referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN, 2017: *Declaration on the Gender-Responsive Implementation of the ASEAN Community Vision 2025 and Sustainable Development Goals*
- ASEAN, 2016: *Projected Gender Impacted of the ASEAN Economic Community*
- ASEAN, 2015: *Vision and Strategic Plan for ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry, 2016-2025*
- ASEAN, 2010: *Ha Noi Declaration on the Enhancement of Welfare and Development of ASEAN Women and Children*
- Black, R. E., L. H. Allen, Z. A. Bhutta, L. E. Caulfield, M. de Onis, M. Ezzati, C. Mathers, J. Rivera, 2008 for the Maternal and Child Undernutrition Study Group: *Maternal and Child Undernutrition: Global and Regional Exposures and Health Consequences. The Lancet 371(9608):243–260*
- FAO. 2016. *Developing gender-sensitive value chains – A guiding framework. Rome*
- FAO, 2013: *CEDAW- Convention on the elimination of all forms of discrimination against women. A tool for gender – sensitive agriculture and rural development policy and programme formulation*
- FAO (2013) *Understanding and integrating gender issues into livestock projects and programmes: A checklist for practitioners.*
- FAO, 2012: *How to mainstream gender in forestry*
- FAO, 2008 *The World Bank and IFAD: Gender in Agriculture, Sourcebook*
- FAO, 2008: *World Fish Center and World Bank: Small-scale capture fisheries – A global overview with emphasis on developing countries: a preliminary report of the Big Numbers Project. FAO and WorldFish Center, Rome & Penang, 62 pages*
- Porter, M. (2006) *Gender and fisheries: A global perspective. Paper presented at Global Coasts: Gender, Fisheries and Contemporary Issues, International Symposium, University of Tromso, Norway, June 2006*
- UN, 2010: *UN Joint programmes integrating gender issues in food security, agriculture and rural development*
- Tauli-Corpuz, Victoria. 2011. *Indigenous women, climate change and forests. Baguio City, Philippines: Tebtebba Foundation.*
- World Bank, *World Development Report 2012: Gender Equality and Development, Washington, DC, 2012*
- World Bank, *Food and Agriculture Organization & International Fund for Agricultural Development, 2009. Gender in agriculture source book*

Lampiran 1: Intervensi gender yang direkomendasikan dalam SPA sektoral

SPA berikut ditinjau untuk merumuskan rekomendasi pendekatan bagi tiap-tiap SPA

Rencana Strategis (SPA) Kerja Sama ASEAN Bidang Pangan, Pertanian dan Kehutanan (2016-2025)

Dorongan Strategis (ST)	Deskripsi	Aktivitas	Intervensi Gender
ST1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dengan berkelanjutan, teknologi 'hijau', sistem manajemen sumber daya, dan meminimalkan kerugian dan limbah sebelum dan sesudah panen	1.13. Standardisasi dan harmonisasi konsep, metode dan penyajian statistik nasional dan penguatan kapasitas teknis AMS untuk melakukan studi multinegara dan analisis dan perencanaan situasi yang akurat.	Mengembangkan konsep dan metode yang harmonis dalam mengintegrasikan gender di sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan
ST2	Meningkatkan fasilitasi perdagangan, integrasi ekonomi dan akses pasar	2.5. Membangun hubungan bisnis antara koperasi pertanian yang potensial dan organisasi petani.	Menjamin partisipasi koperasi dan organisasi perempuan
ST3	Menjamin ketahanan pangan, keamanan pangan, gizi yang lebih baik, dan distribusi pangan yang merata	3.5 Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui diversifikasi sumber pangan dan memperkuat kualitas dan keragaman produksi pangan serta meningkatkan rantai nilai pangan.	Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan ini sangat penting.
ST4	Meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, bencana alam, dan guncangan lainnya	4.7 Mengintegrasikan isu gender ke dalam praktik pertanian, perikanan, dan kehutanan yang ramah iklim untuk mengurangi kerentanan perempuan yang lebih tinggi terhadap dampak sosial dan ekonomi dari bencana alam dan perubahan iklim.	Membangun kapasitas untuk mengintegrasikan gender

ST5	Membantu produsen kecil dan UKM yang terbatas sumber dayanya untuk meningkatkan produktivitas, teknologi, dan kualitas produk, untuk memenuhi standar pasar global dan meningkatkan daya saing sejalan dengan Cetak Biru Kebijakan ASEAN tentang Pengembangan UKM	5.5 Menerapkan kebijakan persaingan untuk memastikan tingkat permainan yang setara bagi produsen dan UKM dan untuk mencegah eksploitasi yang tidak adil oleh perusahaan besar dengan kekuatan pasar dalam rantai pasokan terintegrasi.	Di samping mempertimbangkan tingkat permainan yang setara, perlu juga mempertimbangkan isu-isu kesetaraan gender.
ST6	Memperkuat pendekatan bersama ASEAN pada isu-isu internasional dan regional	6.2 Menyampaikan posisi bersama ASEAN mengenai isu-isu yang memengaruhi sektor FAF di berbagai forum regional dan global	Menyajikan posisi bersama ASEAN tentang kesetaraan gender dalam isu pangan, pertanian dan kehutanan yang mempengaruhi sektor ini di forum regional dan global
ST7	Pengelolaan Hutan Lestari	7.3 Mendorong dialog dengan sektor swasta tentang peningkatan kualitas & efisiensi industri kayu dan pengolahan hasil hutan lainnya	Mendorong dialog regional tentang isu-isu gender dalam pengelolaan hutan lestari

SPA Kerja Sama ASEAN

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2016-2020

Dorongan Strategis (ST)	Deskripsi	Aktivitas	Intervensi Gender
ST1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dengan teknologi 'hijau' yang berkelanjutan, sistem pengelolaan sumber daya, dan meminimalkan kerugian dan limbah sebelum dan sesudah panen	1.2 Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam diskusi kebijakan, perumusan program dan proyek, penelitian dan pengembangan (Litbang) dan memberikan insentif dan mendorong lingkungan yang memungkinkan kemitraan pemerintah-badan usaha (KPBU) menuju peningkatan produktivitas dan kualitas	Mengakui bahwa 'sektor swasta' juga mencakup UKM milik perempuan
		1.6 Meningkatkan investasi dalam kegiatan Litbang kolaboratif, dan memperkuat kolaborasi regional yang ada di antara AMS	Melakukan penelitian kolaboratif tentang gender dan pertanian di AMS.
ST3	Memastikan ketahanan pangan, keamanan pangan, gizi yang lebih baik, dan distribusi pangan yang merata	3.1 Mendorong pendidikan gizi dan kesadaran konsumen tentang pola makan yang sehat	Fokus pada perempuan sebagai agen perubahan untuk mendorong pola makan sehat dan mengonsumsi makanan kaya mikronutrien
ST4	Meningkatkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim, Bencana Alam, dan Guncangan Lainnya	4.1.1 Membangun kapasitas ATWGARD dalam penulisan proposal untuk menjajaki dukungan pendanaan dari dana iklim.	Membangun kapasitas ATWGARD untuk mengintegrasikan gender ke dalam proposal.
		4.4 Mengintegrasikan isu gender ke dalam praktik pertanian, perikanan, dan kehutanan yang ramah iklim untuk mengurangi kerentanan perempuan yang lebih tinggi terhadap dampak sosial dan ekonomi dari bencana alam dan perubahan iklim. (SPFAF 4.7)	Membangun kapasitas untuk mengintegrasikan gender ke dalam program dan kebijakan yang sudah ada dan yang baru.
ST6	Memperkuat pendekatan bersama ASEAN pada isu-isu internasional dan regional	6.2 Mempresentasikan posisi bersama ASEAN tentang isu-isu yang mempengaruhi sektor FAF di berbagai Forum Regional dan Internasional	Pelibatan ATWGARD untuk menyajikan posisi bersama ASEAN tentang isu-isu yang memengaruhi Gender dan FAF

SPA Kerja Sama ASEAN Bidang Peternakan 2016-2020

Dorongan Strategis (ST)	Deskripsi	Aktivitas	Intervensi Gender
ST1	Meningkatkan perdagangan komoditas ternak intra dan ekstra ASEAN	1.1 Peningkatan kebijakan dan lingkungan peraturan untuk memfasilitasi perdagangan	Advokasi pihak yang tepat untuk menangani masalah sosial dan khususnya gender dalam produksi dan pemrosesan ternak.
ST2	Pengendalian penyakit dan keamanan pangan untuk memperluas perdagangan dan melindungi kesehatan manusia		
ST3	Peningkatan produktivitas yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan dampak peternakan terhadap lingkungan dan perubahan iklim	3.1. Sektor peternakan yang lebih produktif dan berdaya saing global	Melakukan penelitian tentang dampak gender pada sektor peternakan akibat perubahan iklim.
ST4	Mendukung ternak kecil untuk menurunkan angka kemiskinan, mewujudkan ketahanan pangan, gizi, dan kesetaraan gender	4.1. Peternakan berfungsi sebagai jalur penting untuk pengentasan kemiskinan, perbaikan gizi, dan kesetaraan gender	Kegiatan 4.1.1 Melakukan advokasi kebijakan agar kredit ternak berbunga rendah dapat diakses oleh masyarakat miskin, terutama perempuan, melalui kredit mikro, UKM dan program lain yang dirancang untuk pengentasan kemiskinan.

SPA Kerja Sama ASEAN Bidang Tanaman 2016-2020

Dorongan Strategis (ST)	Deskripsi	Aktivitas	Intervensi Gender
ST1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dengan teknologi 'hijau' yang berkelanjutan, sistem pengelolaan sumber daya, dan meminimalkan kerugian dan limbah sebelum dan sesudah panen;	1.6 Menyediakan mekanisme kelembagaan dan insentif yang tepat untuk KPBU dalam litbang dan penyebarluasan teknologi, berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mengidentifikasi prioritas, masalah penelitian dengan hasil tinggi, dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk pembentukan dan penyebarluasan teknologi.	Berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mengembangkan 'Contoh Kesetaraan Gender di sub-sektor tanaman yang tumbuh cepat ini'
ST2	Meningkatkan fasilitasi perdagangan, integrasi ekonomi dan akses pasar		Sesuai dengan Deklarasi Buenos Aires WTO tentang Perempuan dan Perdagangan 2017, memastikan partisipasi yang setara dalam isu-isu terkait perdagangan.
ST3	Menjamin ketahanan pangan, keamanan pangan, gizi yang lebih baik dan pemerataan distribusi pangan	3.4 Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui diversifikasi sumber pangan dan memperkuat kualitas dan keragaman produksi pangan serta meningkatkan rantai nilai pangan	Terlibat dengan kelompok perempuan dan UKM untuk mengadvokasi diversifikasi sumber makanan.
ST4	Meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, bencana alam, dan guncangan lainnya	4.2 Mendorong akses ke sumber pendanaan iklim untuk mendukung pertanian cerdas/ramah iklim	Membangun kapasitas dalam mengintegrasikan gender ke dalam proposal untuk mengakses pendanaan iklim.
ST5	Membantu produsen kecil dan UKM dengan sumber daya terbatas untuk meningkatkan produktivitas, teknologi dan kualitas produk, untuk memenuhi standar pasar global dan meningkatkan daya saing.		Serupa dengan SPA Bidang Peternakan:, Advokasi kredit berbunga rendah yang dapat diakses oleh masyarakat miskin, terutama perempuan, melalui kredit mikro, UKM dan program lain yang dirancang untuk pengentasan kemiskinan.

ST6	Memperkuat pendekatan bersama ASEAN pada isu-isu internasional dan regional	6.2 Mempresentasikan posisi bersama ASEAN tentang isu-isu yang mempengaruhi sektor Tanaman di berbagai forum regional dan internasional.	Mengkoordinasikan dan memperkuat posisi bersama tentang isu-isu gender di forum dan organisasi internasional dan regional.
-----	---	--	--

SPA Kerja Sama ASEAN Bidang Perikanan 2016-2020

Dorongan Strategis (ST)	Deskripsi	Aktivitas	Intervensi Gender
ST1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dengan teknologi 'hijau' yang berkelanjutan, sistem manajemen sumber daya, dan meminimalkan kerugian dan limbah sebelum dan sesudah panen	1.1.4. Konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi dan menangani kebutuhan investasi (produksi berkelanjutan, sistem manajemen, investasi pasca panen).	Partisipasi setara gender dari nelayan dan pemimpin perempuan sektor swasta dalam diskusi pemangku kepentingan
		1.4.1 Memperbarui dan memperkuat kebijakan perikanan nasional, kerangka hukum dan kelembagaan melalui konsultasi dan keterlibatan lembaga pemerintah, sektor swasta, nelayan, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan terkait lainnya [lihat POA 7]	Menjamin partisipasi setara antara perempuan dan laki-laki
ST2	Meningkatkan fasilitasi perdagangan, integrasi ekonomi dan akses pasar;	2.4.2 Mendorong kemitraan strategis dengan koperasi Perikanan ASEAN dan organisasi petani, produsen, konsumen dan pedagang.	Sertakan kelompok dan organisasi tani perempuan
ST3	Menjamin ketahanan pangan, keamanan pangan, gizi yang lebih baik dan pemerataan	3.2.2. Berkolaborasi dengan badan-badan ASEAN terkait dalam memfinalisasi dan mengimplementasikan Kebijakan Keamanan Pangan ASEAN, mempercepat penetapan standar keamanan pangan	Berkolaborasi dengan badan-badan ASEAN seperti Keterlibatan kesetaraan gender ASCC pada Kebijakan Keamanan Pangan

ST4	Meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, bencana alam dan guncangan lainnya;	4.1.1. Mendorong kolaborasi antara AMS dan Mitra terkait	Melakukan penelitian tentang isu gender dan perubahan iklim di sektor perikanan.
ST5	Membantu produsen kecil dan UKM dengan sumber daya terbatas untuk meningkatkan produktivitas, teknologi dan kualitas produk, untuk memenuhi standar pasar global dan meningkatkan daya saing.	5.3.1 Memastikan bahwa program dan kebijakan nasional tentang perikanan dan akuakultur menangani aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dari perikanan dan akuakultur yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mata pencaharian, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan	Tekankan isu-isu gender saat mendiskusikan isu-isu sosial.
ST6	Memperkuat pendekatan bersama ASEAN pada isu-isu internasional dan regional yang mempengaruhi sektor FAF	6.2.1. Mendorong dialog di antara AMS untuk menetapkan posisi bersama tentang masalah perikanan yang berdampak pada Kawasan ASEAN	Sertakan posisi umum AMS dalam isu gender di perikanan.

SPA Kerja Sama ASEAN Bidang Kehutanan 2016-2025

Dorongan Strategis	Deskripsi	Aktivitas	Intervensi Gender
ST1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dengan teknologi 'hijau' yang berkelanjutan, sistem pengelolaan sumber daya, dan meminimalkan kerugian dan limbah sebelum dan sesudah panen;	1.3. Peningkatan Tata Kelola Hutan yang melibatkan Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Hutan untuk Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Rakyat.	Soroti isu kesetaraan dan keadilan gender saat meninjau pengaturan kepemilikan atas lahan dari sudut pandang adat dan hukum negara
		1.4 Penerapan Praktik Pengelolaan Berkelanjutan untuk Hasil Hutan Bukan Kayu, seperti Tanaman Obat, Rotan, Bambu, dll.	Di sebagian besar masyarakat, perempuan memiliki pengetahuan mendalam tentang Hasil Hutan Bukan Kayu, oleh karena itu sangat penting untuk melibatkan mereka dalam desain praktik pengelolaan berkelanjutan.
ST2	Meningkatkan fasilitasi perdagangan, integrasi ekonomi dan akses pasar	2.2. Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Hasil Hutan.	Melakukan penilaian rantai nilai produk hutan dengan lensa gender. Libatkan perempuan dalam penilaian untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk Pengembangan Hasil Hutan.
ST3	Menjamin ketahanan pangan, keamanan pangan, gizi yang lebih baik dan pemerataan distribusi pangan	3.1 Integrasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan	Menilai dampak dan risiko gender dari mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang direncanakan di sektor kehutanan.
ST4	Meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, bencana alam, dan guncangan lainnya	4.2. Peningkatan Berbagi Pengalaman dan Pembelajaran.	Memfasilitasi pembelajaran antar AMS dalam bidang gender, kehutanan dan perubahan iklim, Kelompok Kerja ASEAN untuk perhutanan sosial
ST5	Membantu produsen kecil dan UKM dengan keterbatasan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas, teknologi dan kualitas produk, untuk memenuhi standar pasar global dan meningkatkan daya	5.2. Peningkatan Pendekatan Bersama ASEAN dalam Mengatasi Isu Kehutanan Regional dan Internasional.	Mengadopsi dan merumuskan posisi bersama ASEAN tentang Gender dan Kehutanan dan mempengaruhi hasil musyawarah di forum internasional dan regional

	saing sejalan dengan Cetak Biru Kebijakan ASEAN tentang Pengembangan UKM;		
--	---	--	--

Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN (AIFS) dan SPA Ketahanan Pangan di Kawasan ASEAN (2015-2020)

Dorongan Strategis (ST)	Deskripsi	Aktivitas	Intervensi Gender
ST1	Memperkuat Ketahanan Pangan, termasuk Pengaturan Bantuan Situasi Darurat/ Kelangkaan Pangan	1.2. Keberlanjutan rantai pasokan makanan dengan peningkatan industri benih	Buat platform untuk berbagi masalah sosial dan gender dalam industri benih
ST2	Mendorong pasar dan perdagangan makanan yang kondusif	2.1.3. Mengumpulkan data dan melakukan analisis untuk mendukung pertemuan teknis AFSRB, seperti skenario kebijakan untuk pasar beras, penilaian dampak bertani secara kontrak terhadap petani skala kecil, dan studi terkait	Analisis dapat berfokus pada isu-isu gender di pasar dan perdagangan pangan, khususnya beras dan ikan.
ST3	Memperkuat sistem informasi ketahanan pangan terpadu untuk secara efektif meramalkan, merencanakan dan memantau pasokan dan pemanfaatan komoditas pangan pokok	3.1.3. Melakukan penilaian berkala dan tepat waktu tentang keadaan dan prospek beras dan komoditas pangan utama lainnya di ASEAN	Kajian ini juga dapat mencakup isu-isu sosial dan gender terkait beras dan komoditas pangan utama lainnya di ASEAN
ST4	Mendorong produksi pangan yang berkelanjutan	4.1.7. Memperluas dan mendorong pengetahuan petani di luar pertanian untuk memasukkan agribisnis dan kewirausahaan	Pengembangan kapasitas isu gender dalam agribisnis dan kewirausahaan
ST5	Mendorong investasi yang lebih besar dalam industri pangan dan pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan	5.1.1. Menyiapkan peta jalan untuk rantai nilai regional berbasis pertanian dan pangan yang berorientasi pada permintaan	Partisipasi yang setara kelompok perempuan, koperasi dan UKM dalam penyusunan peta jalan.

ST6	Mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul terkait dengan ketahanan pangan	6.1.1. Melakukan studi tentang implikasi jangka panjang dari pengembangan bioenergi dan ketahanan pangan di AMS.	Studi juga harus mencakup bagian tentang implikasi sosial, gender.
ST7	Memfaatkan Informasi Gizi untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan dan pertanian berbasis bukti	7.1.1. Melakukan lokakarya regional untuk mengidentifikasi/mendefinisikan informasi dan indikator nutrisi kunci, metodologi pengumpulan/kompilasi yang diperlukan untuk pemantauan ketahanan pangan secara teratur dan pengembangan kebijakan	Lokakarya ini harus mengintegrasikan isu gender dalam nutrisi.
ST8	Mengidentifikasi kebijakan, kelembagaan, dan mekanisme tata kelola untuk pembangunan pertanian peningkatan gizi di AMS	8.1. Kesadaran dan pengakuan akan pentingnya gizi oleh pemangku kepentingan utama pangan, pertanian dan kehutanan	Partisipasi perempuan sangat penting dalam kegiatan peningkatan kesadaran ini.
ST9	Mengembangkan dan memperkuat kebijakan/program pangan, pertanian dan kehutanan yang meningkatkan gizi dan membangun kapasitas untuk implementasi, pemantauan dan evaluasi	9.1. Kebijakan dan program pangan, pertanian dan kehutanan yang meningkatkan gizi dikembangkan dan diperkuat	Membangun kapasitas untuk mengintegrasikan gender ke dalam kebijakan dan program pangan, pertanian dan kehutanan untuk peningkatan gizi

